

RELIGIOUS MODERATION IN THE PARADIGM OF RELIGIOUS CONFLICT RECONCILIATION IN JAYAPURA-PAPUA

Athoillah Islamy¹, Amirullah²,

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

²Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

¹e-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id, ²e-mail: Jayapura.amir01@gmail.com

Abstract

This study intends to identify the values of religious moderation in the paradigm of inter-religious conflict reconciliation by FKUB Jayapura City. This qualitative research uses a normative-empirical-philosophical analysis approach. Primary data was taken through observation and interviews. The nature of this research approach is descriptive-analytic. The theory of analysis in this study is an indicator of religious moderation formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that there were dimensions of religious moderation values in the conflict reconciliation paradigm implemented by the Religious Harmony Forum (FKUB) of Jayapura City. First, the values of anti-radicalism and tolerance in the socio-religious-based conflict reconciliation paradigm. This can be seen from the paradigm of inclusiveness of religious social values in the dialogue room which was attended by various interfaith leaders and community leaders. Second, the accommodative value of local wisdom and national commitment in the paradigm of conflict reconciliation based on culture and nationalism. This can be seen from the existence of space for religious and social aspirations in socio-cultural pluralism and the spirit of nationalism. The theoretical implication of this study shows that indicators of religious moderation in Indonesia can be a paradigm for fostering inter-religious harmony. The limitation of this research is that it has not examined what factors are the obstacles and supports the Jayapura City FKUB in efforts to reconcile conflicts between religious communities.

keywords: religious moderation, conflict reconciliation, jayapura city

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama oleh FKUB Kota Jayapura. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris-filosofis. Data primer diambil melalui observasi dan wawancara. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Teori analisis dalam penelitian ini, berupa indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik yang diimplementasikan oleh Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) kota jayapura. Pertama, nilai anti radikalisme dan toleransi dalam paradigma rekonsiliasi konflik berbasis sosial-keagamaan. Hal demikian dapat dilihat dari paradigma inklusivitas nilai-nilai sosial keberagamaan dalam ruang dialog yang dihadiri pelbagai tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. Kedua, nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dan komitmen kebangsaan dalam paradigma rekonsiliasi konflik berbasis kebudayaan dan nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya ruang aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam kemajemukan sosial-budaya dan semangat nasionalisme. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa indikator moderasi beragama di Indonesia dapat menjadi paradigma dalam membina

kerukunan hidup antar umat beragama. Keterbatasan penelitian ini yakni belum mengkaji faktor apa yang menjadi kendala dan mendukung FKUB Kota Jayapura dalam upaya rekonsiliasi konflik antar umat beragama.

kata kunci: moderasi beragama, rekonsiliasi konflik, kota jayapura

PENDAHULUAN

Relasi antar umat beragama di Jayapura kini telah membaik, tidak lagi menunjukkan wajah konflik sebagaimana yang pernah terjadi dalam waktu silam. Kini, semangat perdamaian antar umat beragama telah mewarnai kehidupan masyarakat Kota tersebut (Amirullah et al., 2020, p. 21). Kondisi demikian dikuatkan oleh survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, bahwa Indeks KUB Provinsi Papua senantiasa di atas rata-rata indeks nasional. Indeks KUB nasional 2019 adalah 73,83. Sementara itu, indeks KUB Papua 79,00. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yakni 74,80 yang juga diatas indeks KUB nasional sebesar 70,90. Penting diketahui bahwa lokasi sampel pada survei tersebut untuk Provinsi Papua, yakni di Kota Jayapura (Kodina, 2020, p. 299). Prestasi indeks KUB di atas tidak terlepas dari kesadaran paradigma seluruh elemen masyarakat Jayapura untuk senantiasa mewujudkan keharmonisan sosial bermasyarakat dan beragama.

Salah satu peran yang berkontribusi besar dalam hal ini, yakni pelbagai bentuk strategi rekonsiliasi konflik antar umat beragama yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), baik yang ada di tingkat Provinsi, Kota hingga Kabupaten tidak terkecuali di kota Jayapura (Firdaus, 2014, p. 4). Berbagai strategi rekonsiliasi konflik yang dilakukan oleh FKUB Kota Jayapura tersebut sudah pasti nya dibangun berdasarkan paradigma nilai-nilai sosial keberagamaan yang moderat

dalam rangka mewujudkan kehidupan harmonis antar umat beragama. Mengingat kehidupan sosial bagi kehidupan umat beragama tidak dapat dilepaskan dari kesadaran pemeluknya untuk memiliki pola pikir (paradigma) maupun sikap sosial yang moderat, yakni tidak ekstrem kiri maupun kanan, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pluralitas kehidupan sosial yang tinggi (Azis et al., 2021, p. 231).

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama oleh FKUB Kota Jayapura.

Penelitian ini penting dilakukan, karena paradigma dalam strategi penyelesaian konflik antar umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Kota Jayapura secara praksis dapat menjadi *pilot project* bagi FKUB di pelbagai kota lain di Indonesia dalam menangani kasus konflik antar umat beragama. Namun penulis menyadari terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji konflik umat beragama di Jayapura dengan pelbagai fokus dan pendekatan masing-masing, antara lain sebagai berikut. Penelitian Muh. Anang Firdaus (2014) menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kota Jayapura yang harmonis dan toleran berkontribusi terhadap suksepsi peran FKUB Kota Jayapura dalam mewujudkan kerukunan umat beragama (Firdaus, 2014, p. 32). Kemudian penelitian oleh Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, dan Abdul Wahid Haddade (2020) menyatakan peran FKUB Kota Jayapura jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, maka sejalan dengan *maqashid syariah*, seperti

menjaga kemaslahatan agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), dan akal (*hifz aql*) dalam kehidupan sosial yang plural (Amirullah et al., 2020, p. 21). Selanjutnya, Sabara dan Elce Yohana Kodina (2020) dalam penelitiannya menyatakan terdapat berbagai prinsip umat Islam dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Jayapura, antara lain prinsip moderasi dan inklusivisme Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin (Kodina, 2020, p. 297). Berikutnya, penelitian Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful muhyidin, dan Athoillah Islamy (2022) menyimpulkan terdapat manifestasi pelbagai nilai Pancasila yang termuat pada peran FKUB Kota Jayapura dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Berdasarkan pelbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang fokus dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama oleh FKUB Kota Jayapura. Fokus dan pendekatan inilah yang kemudian dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* penelitian ini.

METODE

Penelitian kualitatif berupa studi kasus ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris-filosofis. Data primer diambil melalui observasi dan wawancara. Sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek inti pembahasan, antara lain buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Sementara itu teori yang digunakan sebagai teori analisis dalam penelitian ini, yakni empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berupa nilai komitmen kebangsaan, anti radikalisme, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Empat indikator tersebut akan digunakan untuk menganalisis dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama oleh FKUB

Kota Jayapura yang menjadi objek inti pembahasan penelitian ini. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisis data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam ranah praksis sosialnya, pelbagai radikalisme (terorisme) atas nama agama yang terjadi di Indonesia seringkali diasumsikan dengan produk aksi keberagamaan yang berpijak dari pemahaman maupun doktrin ajaran agama yang radikal (Hamzah, 2019, p. 19). Meski asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, akan tetapi radikalisme atas nama agama menjadi hal yang dapat dijumpai dalam pelbagai kasus yang ada di Indonesia (Asrori, 2019, pp. 118–119). Di sinilah, pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, terlebih para tokoh agama untuk membumikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Pada sub pembahasan ini akan penulis jelaskan tentang empat indikator moderasi beragama di Indonesia yang telah dirumuskan oleh Kemenag RI, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 42–43). Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

Pertama, komitmen kebangsaan. Sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial seseorang atas komitmennya dengan konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak

berhenti di sini, sikap komitmen kebangsaan juga dapat dijadikan sebagai nilai atau indikator dalam menjadikan individu umat beragama agar dapat memiliki pengejawantahan ajaran agamanya secara moderat dalam konteks norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang ada.

Kedua, toleransi. Manifestasi sikap toleransi menjadi bagian dari indikator paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan sosial seseorang dalam menghormati dan menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat beragama di Indonesia khususnya menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia yang harmonis. Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu (kelompok) dapat bersikap toleran dalam merespons kemajemukan yang ada. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan semakin tinggi toleransi terhadap pluralitas suatu negara, maka akan semakin demokratis.

Ketiga, anti radikalisme. Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah radikalisme dalam pembahasan tentang moderasi beragama, yakni sebuah paham maupun sikap (aksi) individu yang memiliki orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui pelbagai kekerasan atas nama ajaran agama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 43–45). Secara umum, pelbagai bentuk radikalisme atas nama agama mengharapkan perubahan signifikan secara cepat kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial maupun norma di suatu tempat (negara).

Pada ranah aksinya, radikalisme juga sering diidentikan dengan aksi terorisme atas nama agama. Hal ini disebabkan kelompok radikal juga dapat melakukan pelbagai bentuk dan cara agar orientasinya terealisasi kendatipun harus meneror atau merugikan

pihak lain yang tidak sejalan. Selain itu, penting untuk dipahami juga bahwa aksi radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada semua pemeluk agama (keyakinan) apapun, yakni tidak hanya agama tertentu (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 45–46).

Keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator moderasi beragama yang keempat ini dapat menjadi basis nilai dalam pembentukan karakter keberagamaan individu agar dapat bersikap moderat dalam merespons pluralitas kearifan lokal yang sudah mentradisi, yakni membudaya pada pelbagai daerah di Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap tradisi lokal diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap moderasi beragama individu yang ramah terbuka dan toleran dalam merespons ragam praktik tradisi kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, pp. 46–47). Terlebih tingginya pluralitas budaya sebagaimana di Indonesia menjadi aset kultural sekaligus penting mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisannya. Hal ini disebabkan aset kultural dapat berpotensi besar dalam memicu terjadinya konflik sosial maupun agama (Prasojo & Pabbajah, 2020, p. 1).

Keberadaan empat indikator moderasi beragama yang telah diuraikan di atas akan menjadi teori analisis dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang ada dalam paradigma rekonsiliasi konflik oleh FKUB Kota Jayapura yang menjadi objek pokok penelitian ini.

Potret Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Jayapura

Jika dilihat yuridis-normatif, eksistensi FKUB di Kota Jayapura mendapat dukungan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor

8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan FKUB. Kemudian Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022. Pelbagai landasan normatif yuridis sebagaimana yang disampaikan Willem F. Ittar selaku Ketua FKUB Kota Jayapura. Ia menjelaskan bahwa FKUB di Kota Jayapura dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka membangun, menjaga, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Eksistensi FKUB tersebut sangat bermanfaat dalam menjawab persoalan umat dan dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum (W. F. Ittar, personal communication, 03 2019).

Keberadaan struktur kelembagaan FKUB di kota Jayapura jika dilihat dalam ketentuan KMA No 1 tahun 2006. Pertama, keanggotaan FKUB meliputi para tokoh agama setempat. Jumlah anggota FKUB Provinsi maksimal 21 orang. Sementara jumlah anggota FKUB Kabupaten atau Kota maksimal 17 orang. Kedua, jumlah keanggotaan FKUB Prov & Kab/Kota ditetapkan atas perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan bentuk representasi minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yg ada di Prov dan Kab/Kota. Kemudian setiap FKUB dipimpin satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris. FKUB Kota Jayapura berkantor di Abepura Kota Jayapura sejak tahun 2017 dengan pelbagai program kegiatan dalam merealisasikan kerukunan antarumat beragama di Kota Jayapura. Berikut susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2017-2022 Kota Jayapura, sebagai berikut Ketua Pdt. Willem F. Ittar (Ketua), Kahar Yelipele (Wakil Ketua I),

Andreas Trismadi, PR (Wakil Ketua II), Eko Siswanto (Sekretaris), Yohanes Nahak (Wakil Sekretaris), sedangkan anggota terdiri atas Pdt. Lucky Matui, Pdt. Betul Karubaba, Pdt. Yesaya Dimara, Pdt. Jantje Suruan, Hendrikus Harun, Ida Bagus Suta Kertya, Pdt. Johanis R. Leleuly, Muh. Said, Pdt. Marten Maury, Sukaryanto, Pdt. Jasmani, Pdt. Moses Pulalo.

Uraian di atas menunjukkan bahwa baik secara yuridis maupun kelembagaan, eksistensi FKUB Kota Jayapura telah memiliki struktur yang baik dan kekuatan hukum kuat serta dukungan sosial. Hal tersebut secara praksis dapat berimplikasi positif bagi suksesi pelbagai program FKUB Kota Jayapura dalam mewujudkan kehidupan yang damai antar umat beragama.

Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Paradigma FKUB Kota Jayapura

Mengacu pada pelbagai riset yang telah banyak dilakukan, bahwa sejatinya pelbagai bentuk konflik bernuansa agama bukan dipicu faktor eksistensi ajaran agama, melainkan oleh pelbagai faktor, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya. Peran keterlibatan faktor agama justru sangat kecil, hanya saja seringkali dikambing hitamkan sebagai pemicu utama (Suratman, 2017, p. 43). Atas dasar inilah upaya rekonsiliasi konflik bernuansa agama membutuhkan paradigma moderasi beragama yang dapat diwujudkan dalam pelbagai bentuk strategi untuk menanggulangi pelbagai motif terjadinya sebuah konflik bernuansa agama yang ada di Indonesia, tidak terkecuali pelbagai konflik bernuansa agama yang terjadi di Jayapura.

Berdasarkan analisis penulis, terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik yang dimanifestasikan oleh FKUB Kota Jayapura dalam implementasi strategi praksis yang ada. Dimensi nilai moderasi beragama tersebut dapat penulis petakan menjadi dua klasifikasi besar. Pertama, nilai anti radikalisme dan toleransi dalam paradigma rekonsiliasi

konflik berbasis sosial-keagamaan. Kedua nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dan komitmen kebangsaan dalam paradigma rekonsiliasi konflik berbasis budaya dan nasionalisme. Kedua langkah instrumentatif tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Nilai Anti Radikalisme dan Toleransi dalam Paradigma Rekonsiliasi Konflik berbasis Sosial-Keagamaan

Pluralitas kehidupan sosial, budaya bahkan agama di Indonesia menjadikannya masuk dalam kategori negara yang mempunyai potensi konflik sosial lebih besar dibandingkan dengan pelbagai negara lain, terlebih dalam konflik sosial keagamaan (Asroni, 2020, p. 66). Berkaitan persoalan ini, Amin Abdullah menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang sensitif dalam memicu terjadinya pelbagai konflik sosial-keagamaan yang ada di Indonesia, antara lain dogma, ritual, interpretasi teks keagamaan, otoritas tokoh agama melalui ajaran keagamaan yang tidak bijak, sejarah kelam, dan institusional agama yang tidak bijak (Kusuma, 2015, pp. 2–4). Oleh karena itu, terjadinya konflik sosial keagamaan di tengah masyarakat tidak dapat dilihat dalam sudut pandang yang monolitik, melainkan perlu adanya pendekatan yang komprehensif dari pelbagai dimensi. Mengingat terjadinya konflik sosial keagamaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang kompleks, tidak tunggal. Pentingnya kesadaran tersebut menjadi hal niscaya yang tidak boleh terabaikan, baik dalam konteks resolusi konflik maupun rekonsiliasi konflik antar umat beragama.

Salah satu langkah praksis rekonsiliasi konflik antar umat beragama yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura, yakni mewujudkan ruang dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat. Orientasi utama diselenggarakannya dialog antar tokoh agama dengan tokoh masyarakat tersebut, yakni untuk memahami problematika krusial yang menghambat pelbagai bentuk kegiatan

kerukunan umat beragama di Kota Jayapura (E. Siwanto, personal communication, 04 2019). Oleh sebab itu, ruang dialog tersebut dapat dikatakan sebagai langkah rekonsiliasi konflik yang berbasis sosial keagamaan yang diinisiasi FKUB Kota Jayapura.

Penting diketahui bahwa pelaksanaan program dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat tersebut sejatinya sering dilakukan oleh FKUB kota Jayapura. Program tersebut juga dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan dialog antar tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Dalam ranah praksisnya, implementasi dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut dilakukan secara kelompok yang kemudian dikonsultasikan pada seluruh tokoh sosial kemasyarakatan, bahkan dari pihak eksternal FKUB Kota Jayapura, seperti tokoh pemuda dan para akademisi. Pada ranah praksisnya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan apa persoalan yang dialami mereka terkait pelbagai hal yang berkaitan erat dengan upaya perwujudan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Sementara itu, isu dominan yang dibicarakan dalam dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yakni berkaitan dengan isu kehidupan beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk di Jayapura, bukan isu politik dan ekonomi. Dengan adanya ruang dialog terbuka tersebut, persoalan yang ada dapat dipahami dan dianalisis bersama dengan baik untuk menemukan solusinya (Said, personal communication, 04 2019).

Rekonsiliasi konflik berbasis sosial keagamaan berupa mewujudkan ruang dialog antar pemuka agama dan tokoh masyarakat menunjukkan rekonsiliasi konflik yang difasilitasi oleh FKUB Kota Jayapura berpijak dari paradigma nilai moderasi beragama berupa nilai anti radikalisme dan nilai toleransi. Kedua nilai atau indikator moderasi beragama tersebut dapat dilihat dari

paradigma inklusivitas nilai-nilai sosial keberagamaan yang ditekankan oleh FKUB Kota Jayapura dalam membuka ruang dialog yang dihadiri pelbagai tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat agar dapat memusyawarahkan tentang pelbagai hal yang mendorong terwujudnya kerukunan umat beragama. Pada konteks inilah, manifestasi nilai-nilai sosial keberagamaan yang inklusif dapat terwujud melalui paradigma rekonsiliasi konflik yang berpijak pada nilai moderasi beragama berupa sikap anti radikalisme atas nama agama dan sikap toleransi. Kedua nilai tersebut menjadi elemen paradigmatis yang sangat urgen dan menunjang dalam terealisasinya ruang dialog yang kondusif. Melalui sikap toleransi tersebut dapat terwujud ketersediaan sikap saling berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks persoalan kehidupan sosial bersama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, p. 45). Semangat toleransi juga menjadi basis yang sangat urgen bagi kehidupan umat beragama dalam merespons kemajemukan ekspresi sosial keberagamaan yang dihadapinya (Yenuri et al., 2021, p. 141).

Sementara itu, manifestasi nilai anti radikalisme sebagai pengejawantahan interpretasi ajaran sosial keagamaan inklusif dalam membunikan paham dan sikap sosial keagamaan moderat pada kehidupan majemuk. Manifestasi tersebut merupakan hal yang sangat urgen, mengingat pemahaman terhadap ajaran agama seringkali hanya mempengaruhi karakter sikap keberagamaan pemeluknya yang cenderung bersifat teosentris dan eksklusif.

Pentingnya reinterpretasi ajaran agama yang berorientasi pada teo-antroposentris dan inklusif dikarenakan agama hadir dalam rangka membimbing manusia kepada kemaslahatan hidupnya di tengah kemajemukan pelbagai aspek kehidupannya. Konsekuensinya, dibutuhkan pemahaman keagamaan yang dapat membentuk karakter pemeluknya agar dapat menjunjung tinggi

sikap toleransi dalam merespons perbedaan yang melitarinya. Pada konteks inilah, wajah manifestasi agama diharapkan dapat menunjukkan wajah kasih sayang dan perdamaian universalnya (Faiz, n.d., pp. 190–191).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat dimensi nilai moderasi beragama berupa nilai toleransi dan anti radikalisme dalam implementasi paradigma rekonsiliasi konflik berbasis nilai sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh FKUB Kota Jayapura.

Nilai Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal dan Komitmen Kebangsaan dalam Paradigma Rekonsiliasi Konflik Berbasis Kebudayaan dan Nasionalisme

Secara umum, terdapat tiga strategi dalam memahami aspirasi rakyat. Pertama, memahami ruang lingkup partisipasi siapa saja yang dapat menyalurkan aspirasi tentang sebuah kebijakan. Kedua, memahami karakter komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya. Apakah satu arah atau timbal balik. Dalam hal ini, karakter komunikasi timbal balik pada ranah praksisnya akan dapat memberikan ruang yang lebih luas terhadap proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Ketiga, memahami keterkaitan antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Pada konteks ini, penting dipahami bahwa semakin adanya keterkaitan produk kebijakan dengan problem yang berkembang di masyarakat, maka pada saat itulah proses penyerapan aspirasi yang terjadi semakin dapat berkualitas (Salman, 2009, p. 34). Tiga strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap sebuah kebijakan membutuhkan pendekatan yang kompleks, tidak sekedar pendekatan yang bersifat monolitik.

Pentingnya kesadaran untuk memahami aspirasi masyarakat atas kebijakan publik (pemerintah) juga tidak

luput dari perhatian besar FKUB Kota Jayapura. Hal demikian dapat kita lihat bahwa dalam upaya rekonsiliasi konflik antar umat beragama, FKUB tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar pada sub bab sebelumnya, melainkan juga menampung aspirasi keagamaan dan aspirasi masyarakat, baik berkaitan sosial maupun budaya (Komar, personal communication, 05 2019).

Pada ranah praksisnya, pelbagai bentuk aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh FKUB Jayapura kemudian disalurkan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah setempat (I. B. S. Kartya, personal communication, 04 2019). Langkah strategis FKUB tersebut menjadi bahan kebijakan pemerintah dalam mendukung terealisasinya kehidupan kemajemukan umat beragama yang harmonis yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam pluralitas kehidupan sosial, budaya maupun agama. .

Keberadaan ruang aspirasi yang difasilitasi oleh FKUB Kota Jayapura sejalan dengan nilai moderasi beragama berupa sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Kesimpulan ini dapat dilihat dari adanya upaya untuk menampung aspirasi masyarakat keagamaan dan kemasyarakatan dalam bingkai kemajemukan sosial budaya masyarakat Jayapura. Terlebih terdapat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Papua umumnya dan Jayapura khususnya yang paralel dengan semangat upaya menampung aspirasi tersebut. Sebagai contoh kearifan lokal di Danau Sentani, Jayapura memiliki ungkapan tradisional yang dimaksudkan membangun keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat, seperti halnya ungkapan *holei narei* (membangun dan merawat tali persaudaraan), kerja keras, gotong royong, saling menghormati, jujur, dan taat adat-istiadat. Pelbagai nilai kearifan lokal tersebut dapat digunakan sebagai paradigma dalam

pelbagai aspek kehidupan sosial, baik sosial-agama, sosial-ekonomi, sosial-politik (Yektiningtyas, 2017, pp. 237–238).

Kearifan lokal lainnya, yakni manifestasi semboyan yang sudah mentradisi di Jayapura berupa *Satu Tungku Tiga Batu*, Semboyan tersebut menjadi personifikasi dari tiga agama utama yang dianut oleh masyarakat Jayapura pada umumnya, yakni: Kristen, Islam, dan Katolik. Semboyan tersebut dimaksudkan untuk merepresentasikan fakta empirik tentang pluralitas kehidupan beragama masyarakat dengan harapan konsep kerukunan umat beragama yang menunjang stabilitas kehidupan sosial yang majemuk (Rofiki, 2018, pp. 68–69).

Tidak hanya memuat nilai adaptif terhadap kearifan budaya lokal, keberadaan ruang aspirasi keagamaan maupun kemasyarakatan juga menunjukkan paradigma rekonsiliasi konflik FKUB Kota Jayapura sejalan dengan nilai moderasi beragama berupa semangat komitmen kebangsaan (nasionalisme). Melalui ruang aspirasi tersebut, iklim demokrasi sebagai sistem politik nasional Indonesia dapat dilihat dari kesadaran untuk melakukan partisipasi seluruh elemen masyarakat Kota Jayapura dengan latar belakang status agama apapun dalam menyampaikan aspirasinya demi terwujudnya kehidupan sosial keberagaman yang harmonis, baik aspirasi tersebut berkaitan dengan aspek keagamaan maupun kemasyarakatan. Pada konteks inilah, tidak ada keistimewaan hak bagi umat beragama mayoritas. Begitu juga tidak ada bentuk diskriminasi hak bagi umat beragama minoritas. Semuanya memiliki hak yang sama dalam ruang aspirasi tersebut (Mukhlis, 2016, p. 181). Terlebih di Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem politik demokrasi Pancasila, maka dalam perumusan segala bentuk kebijakan pemerintah harus menjunjung tinggi pelbagai nilai nasionalisme dan pluralisme sebagaimana

yang termuat dalam Pancasila (Siswanto & Islamy, 2022, p. 25).

Manifestasi nilai moderasi beragama berupa semangat komitmen kebangsaan dalam paradigma rekonsiliasi konflik oleh FKUB Jayapura juga dapat dilihat dari upaya pentingnya sosialisasi kehidupan yang bersatu dan damai. Hal tersebut secara simbolis dilakukan melalui publikasi spanduk-spanduk, stiker, dengan bahasa seruan untuk mewujudkan kerukunan dan keamanan dalam aktivitas ibadah. Melalui pelbagai simbol seruan tersebut akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Ketika seseorang sering melihat yang baik akan mengurangi sisi buruk. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura menggunakan bahasa-bahasa simbol, sebagai lambang kesatuan simbol (E. Siwanto, personal communication, 04 2019).

Untuk menggambarkan nasionalisme masyarakat Jayapura patut diketahui, bahwa nasionalisme di Jayapura tidak selamanya merujuk pada manifestasi empat konsensus bernegara yang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan. Namun juga pentingnya menyelesaikan problem ketimpangan sosial dalam segala aspeknya. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi peran aktif pemerintah pusat maupun pemerintah setempat dalam menanggulangnya (Syuhudi, 2019, p. 140). Di sinilah paradigma FKUB Kota Jayapura melalui pelbagai peran praksisnya dapat berkontribusi besar dalam memupuk semangat nasionalisme, terlebih dalam konteks kehidupan sosial keberagamaan yang majemuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik yang diimplementasikan oleh Forum Kerukunan

Umat beragama (FKUB) kota Jayapura. Pertama, nilai anti radikalisme dan toleransi dalam paradigma rekonsiliasi konflik berbasis sosial-keagamaan. Hal demikian dapat dilihat dari paradigma inklusivitas nilai-nilai sosial keberagamaan yang ditekankan oleh FKUB Kota Jayapura dalam membuka ruang dialog yang dihadiri pelbagai tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membicarakan pelbagai hal demi terwujudnya kerukunan umat beragama. Kedua, nilai akomodatif terhadap kearifan lokal dan komitmen kebangsaan dalam paradigma rekonsiliasi konflik berbasis kebudayaan dan nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya FKUB Kota Jayapura untuk menampung aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam kemajemukan sosial-budaya masyarakat Jayapura dan semangat nasionalisme. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa indikator moderasi beragama di Indonesia (komitmen kebangsaan, anti radikalisme, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal) dapat menjadi landasan paradigmatis dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama.

SARAN/REKOMENDASI

Secara praktis, dimensi nilai-nilai moderasi beragama dalam paradigma rekonsiliasi konflik antar umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Kota Jayapura dapat menjadi *pilot project* bagi FKUB di pelbagai kota lain di Indonesia dalam menangani kasus konflik antar umat beragama. Keterbatasan penelitian, yakni belum mengkaji tentang faktor apa sajakah yang menjadi kendala dan mendukung FKUB Kota Jayapura dalam upaya rekonsiliasi konflik antar umat beragama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah

membantu proses penelitian ini, dari tahap awal sampai akhir, terlebih kepada para pengurus FKUB Kota Jayapura yang telah

bersedia untuk diwawancarai dan telah banyak memberikan informasi berkaitan dengan data objek inti penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A., Salenda, K., Said, N., & Haddade, A. W. (2020). Establishing Harmony Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari'Ah Perspective. *Jurnal Diskursus Islam*, 8(1), 21–29.
- Asroni, A. (2020). Resolusi Konflik Agama: Perspektif Filsafat Perennial. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 16(1), 64–78.
- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Azis, D. K., Saihu, M., Hsb, A. R. G., & Islamy, A. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 229–244.
- Faiz, A. A. (2020). Transformasi Konflik Agama dan Strategi Reformatif Pada Pembangunan Budaya Damai. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 179–192.
- Firdaus, M. A. (2014). Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jayapura. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(1), 1–34.
- Hamzah, A. R. (2019). Radicalisme and Tolerance Based on Islam Nusantara. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 29–45.
- Ittar, W. F. (2019). *Moderasi Beragama dalam Paradigma Rekonsiliasi Umat Beragama di Kota Jayapura* [Personal communication].
- Kartya, I. B. S. (2019). *Moderasi Beragama dalam Paradigma Rekonsiliasi Umat Beragama di Kota Jayapura* [Personal communication].
- Kodina, E. Y. (2020). Kerukunan Umat Beragama dalam Pikiran dan Praktik Kelompok Keagamaan Islam Di Jayapura. *Harmoni*, 19(2), 297–310.
- Komar. (2019). *Moderasi Beragama dalam Paradigma Rekonsiliasi Umat Beragama di Kota Jayapura* [Personal communication].
- Kusuma, W. H. (2015). Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik Keagamaan di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 15(1).
- Mukhlis, F. H. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 171–186.
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1).
- Rofiki, A. A. (2018). Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Kerukunan Umat Beragama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kota Jayapura. *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 2(1), 62–73.
- Said. (2019). *Moderasi Beragama dalam Paradigma Rekonsiliasi Umat Beragama di Kota Jayapura* [Personal communication].

- Salman, M. (2009). *Analisis penyerapan aspirasi masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008*.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 19–40.
- Siwanto, E. (2019). *Moderasi Beragama dalam Paradigma Rekonsiliasi Umat Beragama di Kota Jayapura* [Personal communication].
- Suratman, Y. P. (2017). The Internal Conflict Taxonomy in Indonesia That Leads to Proxy War. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1), 43–58.
- Syuhudi, M. I. (2019). Potret Kebangsaan Generasi Muda Di Kota Jayapura. *MIMIKRI*, 5(2), 124–140.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI. <https://www.google.com/search?q=Tim+Penyusun+Kementerian+Agama+RI%2C+Moderasi+Beragama&oq=Tim+Penyusun+Kementerian+Agama+RI%2C+Moderasi+Beragama&aqs=chrome..69i57j0i333.541j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Walikota Jayapura. (2017). *Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022*. Walikota.
- Yektiningtyas, W. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Sentani, Papua, dalam Ungkapan Tradisional. *ATAVISME*, 20(2), 237–249.
- Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 141–156.